

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan dunia global. Untuk mencapainya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Optimalisasi kualitas pendidikan bukanlah tugas ringan karena mencakup berbagai persoalan yang kompleks, yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pembelajaran.¹

Di samping itu, Pesantren juga mengemban tugas penting, yakni bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar umat Islam dapat berperan aktif dan tetap *survive* di era globalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia sering mendapat kritik, karena dianggap masih tertinggal dalam melakukan pengembangan kualitas manusianya. Padahal dari segi kuantitas Indonesia memiliki sumber daya manusia melimpah yang mayoritas beragama Islam. Mengapa pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat abad XXI sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan (*hypercompetitive situation*). John Naisbitt dan Patricia Aburdene sebagaimana

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 20.

dikutip A. Malik Fadjar, pernah mengatakan bahwa terobosan paling menggairahkan dari abad XXI bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang apa artinya manusia itu. Pengembangan kualitas SDM bukan persoalan yang gampang dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas pada tingkat pembentukan konsep dasar tentang manusia serta perhitungan yang matang dalam penyiapan institusi dan pembiayaan.² Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Dalam paradigma baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan optimalisasi peran masyarakat memperoleh perhatian³

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional di samping prioritas yang lainnya, yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan optimalisasi relevansi melalui kebijaksanaan keterkaitan dan kesepadanan.

Kehadiran pesantren sebagai institusi pendidikan mampu memberikan sumbangan penting dan krusial dalam proses transmisi ilmu-ilmu Islam, reproduksi ulama, pemeliharaan ilmu, dan tradisi Islam, bahkan pembentukan

² A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), Cet.I, 156.

³ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*,....15.

dan ekspansi masyarakat Muslim santri.⁴ Pesantren menjadi bagian infrastruktur masyarakat yang secara makro telah berperan menyadarkan masyarakat untuk memiliki idealisme, kemampuan intelektual, dan perilaku yang baik guna menata dan membangun karakter bangsa. Pesantren secara berkesinambungan berusaha membentuk perilaku masyarakatnya.⁵

Mempertimbangkan proses perubahan yang terjadi di pesantren, tampak bahwa hingga dewasa ini lembaga tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya maupun yang sudah mengalami perubahan, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu, pesantren semakin tumbuh dan berkembang kuantitas maupun kualitasnya. Tidak sedikit masyarakat yang menaruh perhatian dan harapan terhadap pesantren sebagai pendidikan alternatif. Terlebih lagi dengan berbagai inovasi sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren dengan mengadopsi corak pendidikan umum, menjadikan pesantren semakin kompetitif untuk menawarkan pendidikan kepada masyarakat. Meski telah melakukan berbagai inovasi pendidikan, sampai saat ini pendidikan pesantren tidak kehilangan karakteristiknya yang unik yang

⁴Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), 184-185.

⁵Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 117.

membedakan dirinya dengan model pendidikan umum yang diformulasikan dalam bentuk sekolahan.⁶

Sebagai institusi yang memproduksi manusia yang pintar agama, pesantren tentunya harus menghasilkan santri (*out-put*) yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. *Output* tersebut selain berimplikasi secara personal, juga berdampak positif secara sosial. Artinya, sosok santri tidak hanya pada sisi personal santri, tapi mempunyai imbas pada komunitas di mana santri tersebut berada. Hasil implikasi tersebut dapat dilihat dari intensitas keuntungan yang besar yang diproduksi pesantren terhadap lingkungan sekitar, di antaranya berupa keuntungan pragmatis bagi aspek yang berdimensi kultural, edukatif, dan sosial.⁷

Dalam dimensi kultural, kehidupan santri di pesantren ternyata sering kali dihiasi dengan prinsip hidup yang mencerminkan kesederhanaan dan kebersamaan melalui aktifitas “mukim”, yang memunculkan sikap solidaritas sosial terhadap sesama. Dari aspek edukatif, pesantren mampu menghasilkan calon pemimpin agama (*religious leader*) yang piawai menaungi kebutuhan praktik keagamaan masyarakat sekitar, hingga kehidupannya memperoleh berkah dari Tuhan. Sedangkan dalam aspek sosial, keberadaan pesantren seakan telah

⁶ M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogya- karta: Laksbang, 2006), 10-11.

⁷ Muhaimin, “Pesantren dalam Bingkai Mutu Pendidikan Global: Meretas Mutu Pendidikan Pesantren Masa Depan (Suatu Kata Pengantar)”, dalam Umiarso dan Nur Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan, Menjawab Prob- lematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), xix

menjadi semacam “*community learning centre*” yang berfungsi menuntut masyarakat, sehingga memiliki *life style* agar hidup dalam kesejahteraan.⁸

Tiga keuntungan pragmatis yang dimunculkan oleh pesantren tersebut menjadi kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Pesantren akan memperkuat karakter sosial sistem pendidikan nasional yang turut membantu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kehandalan penguasaan pengetahuan dan kecakapan teknologi yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai luhur keagamaan. Pesantren telah menjadi *center of excellence* bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki basis moralitas dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, SDM yang dilahirkan dari pesantren ini secara ideal dan praktis dapat berperan aktif dalam setiap proses perubahan sosial menuju terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang paripurna.

Namun, seiring perubahan yang terus bergulir, pesantren dihadapkan pada akselerasi mutu pendidikan yang menuntut kesesuaian *output* pendidikan dengan alur perkembangan sains dan teknologi. Pesantren dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Perbaikan mutu pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pesantren dinilai kurang efektif, karena lebih bersifat *input oriented*. Paradigma ini memberikan pemahaman bahwa perbaikan mutu pendidikan di pesantren bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor *input* pendidikan, tapi juga harus lebih

⁸ Ibid

memperhatikan faktor proses pendidikan. Pola pendidikan pesantren harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan suatu paradigma yang senantiasa berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Perubahan orientasi dan paradigma pendidikan pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Sebab model pendidikan pesantren diyakini masih menjadi wahana strategis mengubah masa depan, yang mampu melakukan hubungan dialektikal dengan transformasi sosial dan arah pembangunan bangsa. Mutu pendidikan pesantren akan terkonstruksi dengan baik jika pesantren mampu mendesain sistem pendidikannya sesuai dengan tuntutan mutu pendidikan dewasa ini.

Sebagai konsekuensi lain dari perkembangan yang terjadi, pondok pesantren dituntut untuk melakukan inovasi sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan perubahan dalam suatu pola pembinaan, yang menempatkan pendidikan pondok pesantren sebagai: (1) Bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, (2) Penghubung antara dunia IPTEK dan kebutuhan masyarakat, (3) Upaya optimalisasi pola analitik yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan, (4) Bentuk partisipasi dalam perbaikan dan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerjasama internasional dalam upaya mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia, (5) Upaya yang memungkinkan optimalisasi seluruh kemampuan serta kepribadian manusia,

mobilitas dalam memperoleh pengalaman pendidikan, diversifikasi, demokratisasi dalam pendidikan, proses belajar, mobilisasi sumber masyarakat untuk pendidikan dan pertumbuhan kegairahan kegiatan penelitian bagi seluruh komponen pondok pesantren.

Terlepas dari hal tersebut, usaha-usaha terhadap optimalisasi mutu pendidikan pondok pesantren telah dilakukan sejak abad ke-19, terutama pada aspek kepemimpinan, kurikulum, tempat belajar (sarana dan prasarana), dan proses atau sistem pembelajarannya. Tentu, reformasi pondok pesantren dalam dinamikanya yang panjang dimaksudkan untuk mencari format ideal mutu pendidikan pondok pesantren.

Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan terutama dalam Pasal 1 ayat 4,⁹ dan Pasal 8 ayat 1 dan 2,¹⁰ mengakui secara eksplisit dan tegas terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, sejajar dengan

⁹Pasal 1 ayat 4 PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan bahwa “Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya”.

¹⁰Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

lembaga-lembaga pendidikan formal lain seperti sekolah umum dan madrasah¹¹ diasumsikan membawa berbagai konsekuensi kepada kebijakan-kebijakan pendidikan pondok pesantren yang akan diambil selanjutnya. Sehingga pondok pesantren mampu menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, baik dalam bidang ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum.

Mutu pendidikan pesantren menurut UU tersebut minimal mencakup tiga dimensi mutu, yaitu *pertama* dimensi proses, adalah penguasaan dan kepemilikan kecakapan proses. Hasil pembelajaran dari dimensi ini adalah *intelektual skill*, kecepatan berfikir, menyimpulkan, dan memprediksi. *Kedua* dimensi konsep, adalah penguasaan dan kepemilikan konsep-konsep keilmuan atau pemilikan materi esensial dari konsep-konsep kunci. Dan *ketiga* dimensi aplikasi adalah kecakapan menerapkan konsep kunci (keilmuan atau kejuruan) dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Data Kementerian Agama Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan pondok pesantren yang luar biasa. Secara kuantitatif, pada tahun 2015 tercatat jumlah pondok pesantren di Indonesia meningkat yaitu: 1.053 buah dengan jumlah santri lebih dari 25.390 orang yang mukim terdiri dan sebanyak 46.319 yang tidak mukim (54%).¹³

¹¹UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 ayat 4 menyebutkan, bahwa: “Bentuk pendidikan agama bisa berupa pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan pendidikan lain yang sejenis”.

¹²Husni Ramin, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos 2001), 52.

¹³Data dari Kementerian Agama Kabupaten Garut

Tabel 1.1
Jumlah Pondok Pesantren, Kiai/Guru dan Santri
di Kabupaten Garut

<i>Kecamatan</i>	<i>Pondok Pesantren</i>	<i>Pengasuh</i>	<i>Jumlah Santri Mukim</i>	<i>Tidak Mukim</i>
1. Cisewu	25	120	605	1.100
2. Caringin	8	32	192	352
3. Talegong	15	60	360	660
4. Bungbulang	38	180	915	1.672
5. Mekarmukti	4	15	96	176
6. Pamulihan	1	5	26	40
7. Pakenjeng	60	240	1.450	2.640
8. Cikelet	29	140	698	1.276
9. Pamenungpeuk	26	129	630	1.147
10. Cibalong	10	45	245	440
11. Cisompet	19	80	456	836
12. Peundeuy	26	128	624	1.140
13. Singajaya	39	195	938	1.716
14. Cihurip	5	25	122	220
15. Cikajang	55	275	1.328	2.420
16. Banjarwangi	41	205	984	1.804
17. Cilawu	14	70	348	616
18. Bayongbong	39	195	945	1.716
19. Cigedug	36	180	864	1.584
20. Cisurupan	44	220	1.058	1.938
21. Sukaresmi	16	80	386	702
22. Samarang	34	165	828	1.496
23. Pasirwangi	42	200	1.015	1.848
24. Tarogong Kidul	16	72	386	702
25. Tarogong Kaler	26	128	624	1.144
26. Garut Kota	12	50	290	528
27. Karangpawitan	32	155	768	1.408
28. Wanaraja	28	132	672	1.232

29. Pangatikan	5	18	120	218
30. Sucinaraja	1	4	24	42
31. Sukawening	29	140	696	1.276
32. Karang tengah	3	12	72	130
33. Banyuresmi	21	105	504	924
34. Leles	16	67	384	704
35. Leuwigoong	13	60	312	572
36. Cibatu	39	190	936	1.715
37. Kersamanah	11	53	264	482
38. Cibiuk	21	102	506	924
39. Kadungora	20	96	485	880
40. Limbangan	48	230	1.160	2.112
41. Selaawi	12	58	295	528
42. Malangbong	74	365	1.778	3.256
Jumlah	1.053	5.021	25.390	46.319

Sumber : Kementerian Agama Kab. Garut

Hadirnya kebijakan pendidikan keagamaan mendorong semua lembaga keagamaan termasuk pesantren untuk senantiasa melakukan evaluasi dan akreditasi melalui kementerian Agama (Pasal 12 PP 55/2007), sehingga akan menciptakan sistem penjamin dan pengendalian mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama.

Mutu adalah ukuran terhadap sesuatu yang diharapkan tercapai dan suatu produk atau layanan bagi para pelanggan yang ada. Oleh karena itu, kaitannya dengan pendidikan dapat ditegaskan bahwa pendidikan yang baik ialah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah yang memiliki standar yang jelas dan telah disepakati bersama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjadi bagian penting sistem pendidikan nasional perlu memiliki standar

mutu yang jelas. Maka standar mutu pendidikan pesantren yang bermutu adalah yang dapat memenuhi standar pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005, sebagaimana yang mencakup delapan standar. Dengan demikian, pendidikan pesantren dikatakan bermutu bila orientasi mutu pendidikan yang terdiri dari *input*, proses dan *output* dapat terpenuhi dengan baik.

Setiap pesantren mempunyai karakter tersendiri, maka pesantren sebagai lembaga pendidikan *indigous* dituntut juga untuk memelihara budaya pesantren yang sudah dibangun, dikarenakan budaya pesantren dapat diartikan sebagai suatu substantif dari proses pembentukan dari keunggulan kelembagaan yang dapat diindikasikan dengan dua hal, yaitu: (1) tumbuhnya tradisi keilmuan dan (2) kejelasan sistem pengelolaan pendidikan pesantren. Budaya keilmuan menyangkut keilmuan yang dikembangkan dan diunggulkan pada lembaga tersebut dan kejelasan sistem pengelolaan lembaga pendidikan menyangkut prosedural manajerial pengelolaan lembaga pendidikan yang sistemik.

Dewasa ini, para pengamat dan para praktisi pendidikan dikejutkan dengan fenomena yang terjadi pada pesantren, diantaranya yaitu: (1) banyaknya pesantren yang mengalami tranformasi sehingga sebagian telah memasukan lembaga pendidikan umum, (2) banyaknya lembaga pesantren yang tergusur sejak dilancarkannya modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia muslim dan sebagian pesantren tidak mampu bertahan,⁴ (3) banyaknya pesantren yang

mengalami penurunan animo masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah santri menurun setelah penyesuaian diri dengan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum, (4) sebagian pesantren enggan dengan perubahan (dan lebih memilih memelihara budaya lama) dengan menolak masuknya kebijakan kementerian agama dan kementerian pendidikan dan kebudayaan karena khawatir akan kehilangan karakter budaya pesantren yang sudah mapan dan dipercaya masyarakat. Seiring dengan banyaknya pesantren yang melakukan transformasi dirinya dengan mengadopsi dan/atau mendirikan sekolah umum tidak lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang semakin banyak tantangan dan kompleks. Mutu pendidikan pesantren saat ini menjadi perhatian yang serius agar tidak tergerus oleh arusnya zaman yang penuh dengan kompetitif.

Atas dasar itulah, visi misi pesantren ke depan haruslah menitikberatkan kepada optimalisasi mutu pendidikannya, bukan kuantitas yang dikejar namun kualitas *out put*-nya yang didamba-dambakan. Representasi pesantren besar yang ada di wilayah Kabupaten Garut yang tetap *survive* dan terus meningkatkan kualitas mutu pendidikannya di tengah-tengah perubahan dan menarik untuk dikaji dalam penelitian ini ialah: (1) Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah sebagai pondok pesantren *by design* modern sejak berdirinya. (2) Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Kota Garut sebagai pondok pesantren *by design* modern sejak berdirinya. (3) Pesantren Persatuan Islam Ranca bogo Tarogong Kabupaten

Garut. Ketiga pondok pesantren tersebut, masih tetap *survive* dan menjadi alternatif utama bagi para orang tua untuk memasukkan putra-puterinya. Hal tersebut disebabkan oleh berhasilnya pesantren sebagai lembaga pendidikan bermutu yang telah berhasil membuktikan kualitas pendidikan, pengabdianya pada umat, bangsa, dan Negara dalam menciptakan karakter para santri.

Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab menjaga moral bangsa adalah Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut, yang memiliki tugas mulia, pada sisi lain pesantren tersebut memiliki kemampuan penyesuaian dengan berbagai dinamika arus kemajuan agar eksistensinya tidak tergerus jaman. Dinamika ini dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dinamika materi (bahan yang diajarkan), dinamika administrasi, dan manajemen.¹⁴ Berbagai dinamika ini diniscayakan untuk dapat diadopsi pesantren agar memperoleh pengakuan dalam dimensi kenegaraan dan/atau kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan survey di lapangan, ditemukan masalah secara spesifik yang terjadi di tiga pondok pesantren, yaitu standar-standar pendidikan yang ditentukan belum berjalan dengan optimal sehingga mutu ke tiga pondok pesantren tersebut belum meningkat. Masalah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah yaitu masih dijumpai beberapa kondisi yang melatarbelakangi penelitian ini, diantaranya dijumpai keadaan sumberdaya

¹⁴Haidar Putra Daulay, *Pendidikan*, 36

manusia belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian masih dijumpai budaya organisasi yang kurang optimal, padahal di lingkungan Yayasan al-Musaddadiyah telah diatur dan ditetapkan dalam beberapa keputusan Yayasan yang meliputi peraturan tentang etika, etos kerja, dan kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Yayasan masih dijumpai tingkat ketidakhadiran guru (dengan berbagai alasan) dan keterlambatan mulai kerja (proses belajar) yang relatif tinggi pada proses pembelajaran.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya menjadi norma yang ditaati oleh anggota organisasi. Sementara itu, masalah yang ditemukan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah yaitu masih adanya kualifikasi akademik guru/ustadz yang belum memenuhi aturan yang berlaku, dan sistem pemondokan atau *boarding school* yang diterapkan pesantren Darul Arqam belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan aktivitas santri di asrama kurang adanya pengawasan dari pihak Pembina sehingga memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi *bullying* oleh senior santri. Hal yang sama terjadi di Pesantren Persatuan Islam Rancabogo, yaitu ditemukan masalah masih adanya guru/ustadz yang tidak linier dalam mengajar, kemudian *atmosphere academic* santri yang kurang maksimal.

¹⁵Hasil wawancara dengan Sekretaris Yayasan Al-Musaddadiyah tanggal 07 April 2016, yang dilaksanakan di Kantor Yayasan Al-Musaddadiyah Garut.

Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut sebagai suatu entitas yang spesifik, memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal yang ada. Fokus aktivitas optimalisasi mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Garut Rancabogo Tarogong tentu akan berbeda.

Inilah latar belakang kenapa penelitian tentang mutu pendidikan pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut ini menarik untuk dilakukan, dimana ketiga pondok pesantren tersebut sampai saat ini masih tetap eksis dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan.

Berangkat dari penjelasan di atas, diketahui bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan pondok pesantren Al-Musadaddiyah, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Kabupaten Garut tidak hanya menjadikan pesantren ini bertahan dan berkembang tetapi juga dapat mempertahankan proses pendidikan pesantrennya. Sehingga penelitian tentang mutu pendidikan pondok pesantren berbasis Standar Nasional Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong

Garut menjadi penting untuk mempertahankan fungsi utama pesantren yaitu *transmisi* dan *transfer* ilmu agama Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan penciptaan kader-kader ulama supaya dapat dipertahankan.

Fenomena mutu pendidikan yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Garut menarik untuk diteliti, sehingga masalah ini penting untuk dijelaskan dan dielaborasi secara ilmiah dalam suatu penelitian dengan judul **“Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Standar Nasional Pendidikan (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam (Persis) Rancabogo Tarogong Kabupaten Garut)”**.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Prinsip pesantren adalah *al muhâfadzah ‘ala al-qadîm al-shalih, wal akhdzu bi al jadîd al-ashlah*, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif. Pesantren di masa yang akan datang dituntut berbenah dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. Tapi perubahan dan pembenahan yang dimaksud tidak hanya sebatas manajemen dan bukan coraknya apalagi berganti baju dari salafiyah ke *Mua’syir* (modern). Karena hal itu, hanya akan menghancurkan nilai-nilai positif pesantren seperti yang terjadi sekarang, dimana lulusan pesantren tidak bisa mengkaji kitab

kuning. Idealnya pesantren ke depan harus bisa mengimbangi tuntutan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi kesalafannya.

Nampaknya, konsep *Islamic Boarding School* sebagaimana telah ditawarkan oleh Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut dapat menjadi alternatif pilihan sebagai model optimalisasi peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren yang akan datang. Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan seperti ini. Sehingga, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan berdaya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal. Mengingat luasnya masalah yang memungkinkan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini di tiga lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut. Kemudian rumusan masalah tersebut dituangkan ke dalam pertanyaan utama penelitian, yaitu: “Bagaimana Optimalisasi Mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut? Dalam rangka menjawab masalah pokok tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potret mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut?
2. Bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut?
4. Bagaimana dampak dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut?
5. Bagaimana prospek dari peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut bisa

meningkat dan memuaskan secara religius bagi masyarakat yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia baru.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Potret mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut.
2. Untuk menjelaskan upaya peningkatan Mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut.
4. Untuk mengetahui dampak dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut.
5. Untuk mengetahui prospek peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Ilmu Pendidikan Islam, khususnya teori optimalisasi mutu pendidikan pondok pesantren.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dalam peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren, menjelaskan pondok pesantren dikelola, sehingga mampu bertahan, sementara sistem pendidikan tradisional lain hampir punah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bagi umat Islam dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan lembaga dan sistem pendidikannya ketika berkeinginan mempertahankan pendidikan pesantren.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikemukakan konsep-konsep dan sejumlah kata kunci yang akan dibahas konsepnya, yaitu, Mutu pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, pondok pesantren. Sistematika kerangka teori ini diawali dengan pembahasan mutu pendidikan, yang diperkuat dengan standar nasional pendidikan dan pondok pesantren.

Mutu adalah ukuran terhadap sesuatu yang diharapkan tercapai dari suatu produk atau layanan bagi para pelanggan yang ada. Oleh karena itu, kaitannya dengan pendidikan dapat ditegaskan bahwa pendidikan yang baik ialah pendidikan yang bermutu.

Adapun mutu dalam pendidikan dengan definisi yang relatif mempunyai dua aspek: (a) pengukuran kemampuan lulusan sesuai dengan tujuan sekolah yang ditetapkan dalam kurikulum, (b) pengukuran terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pelanggan, yaitu orang tua siswa dan masyarakat.¹⁶

Menurut Ali, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang bisa memenuhi harapan atau keinginan para *customer* (pemakai/pelanggan). *Customer* pendidikan itu meliputi *internal customer* (pemakai/pelanggan di dalam), dan *external customer* (pemakai/pelanggan di luar). *Internal customer* pendidikan misalnya dalam sebuah perguruan tinggi ada dosen dan karyawannya. Jadi jika kualitas pendidikan di lembaga pendidikan, maka pendidiknya juga akan merasa puas, begitu juga dengan karyawannya. Sedangkan, *eksternal customer* meliputi *primary customer*, *secondary customer*, dan *tersiery customer*.¹⁷

a. *Primary customer* atau pemakai pertama adalah peserta didik yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan lembaga pendidikan.

¹⁶ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005), 2.

¹⁷ Mohammad Ali, *Penjaminan Mutu Pendidikan* (2011), tersedia pada <http://m-ali.net/?p=78>, diunduh tanggal 6 Agustus 2016

- b. *Secondary customer* atau pemakai kedua adalah para stakeholder seperti orang tua, penyandang dana, pemberi bantuan, atau pemerintah yang merasa puas dengan kinerja perguruan tinggi tersebut.
- c. *Tertiary customer* atau pemakai ketiga adalah pasar, perusahaan, atau masyarakat yang akan menerima dan menggunakan lulusan perguruan tinggi tersebut.

Memasuki era modernisasi, Azra¹⁸ menggambarkan dua tantangan yang harus dihadapi pondok pesantren; meluasnya globalisasi di satu sisi dan tuntutan penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di sisi lain. Globalisasi dalam segala bentuknya mempunyai eskalasi yang cepat dalam membentuk baik-buruk dan hitam-putihnya budaya masyarakat sehingga tingkat kesiapan pondok pesantren menghadapi gelombang globalisasi ini, itu pula akan berakibat pada kehidupan pondok pesantren ke depan. Jika tidak siap, pondok pesantren akan mengalami penurunan peran, misalnya peran kyai akan tergeser oleh keberadaan televisi dan media informasi lainnya yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dalam penciptaan SDM yang unggul dalam sains dan teknologi, pondok pesantren belum melakukan secara maksimal. Ada kesan bahwa pondok pesantren terlalu larut secara akademis dalam pendidikan saja, kurang dalam memberikan bekal khusus dalam bentuk keterampilan lain selain keterampilan membaca kitab.

¹⁸Azyumardi Azra, *Dilema Pesantren Menghadapi Globalisasi, dalam Dinamika Pesantren: Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat ini* (Jakarta: Yayasan Islam Al-Hamidiyah dan Yayasan Saifudin Zuhri, 1998), 141.

Di samping itu, tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga berdampak terhadap eksistensi pondok pesantren saat ini. Persepsi masyarakat yang masih kuat di seputar ‘dunia kerja’ menjadikan keberadaan suatu lembaga pendidikan pondok pesantren akan terancam. Kurangnya *civil effect* yang dimiliki pondok pesantren merupakan persoalan tersendiri. Kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya kelak setelah menyelesaikan studi mendapatkan pekerjaan dan bisa melanjutkan studi. Persoalan seperti ini masih membayangi pondok pesantren, khususnya yang masih mempertahankan ciri khas ‘kesalafiyahannya’ dengan sajian pelajaran agama yang lebih dominan, karena pondok pesantren merupakan cerminan dari dunia tradisional Islam.¹⁹ Padahal lembaga pendidikan pondok pesantren sejak berdirinya telah memiliki kaidah yang sangat membumi dan kontekstual, yaitu *al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah*, artinya memelihara atau memegang nilai-nilai atau tradisi lama yang positif dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Apalagi kaidah yang berkembang di pondok pesantren ini dibalik akan lebih dinamis dan inovatif menjadi *al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah wa al-muhafadzatu bi al-qadim as-shalih* (mentransfer nilai-nilai baru (inovasi) yang lebih baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang baik). Kaidah ini memungkinkan pondok pesantren akan tetap bertahan (*survive*), dan bahkan berkembang di tengah-tengah arus perubahan dunia, serta memiliki kemampuan untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang sudah maju atau modern.

¹⁹Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 42.

Pondok pesantren sebagai sebuah organisasi dapat hidup terus atau berkembang, apabila organisasi tersebut dapat memenangkan persaingan yang terjadi di lingkungan eksternalnya, kemenangan dapat dicapai apabila organisasi tersebut mempunyai upaya yang efektif dalam mengembangkan sekaligus mempertahankan keberadaannya dan bisa menghadapi lingkungan eksternalnya.

Salah satu upaya dalam mengembangkan dan mempertahankan pendidikan pondok pesantren adalah dengan meningkatkan mutu. Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan pondok pesantren istilah mutu dimaksudkan dalam konsep relatif, kualitas atau mutu berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). Sallis, seperti yang dikutip oleh Nurkholis, mengemukakan kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan,²⁰ baik mutu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, proses dan mutu manajemen. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal.

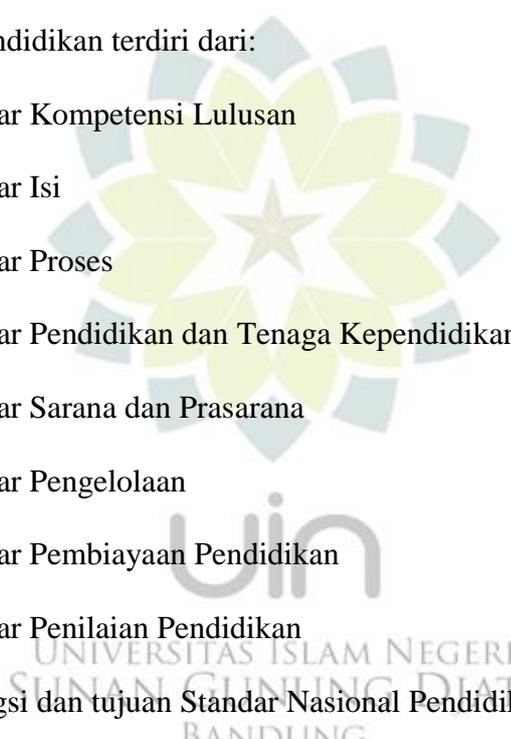
Pendidikan yang bermutu adalah yang memiliki standar yang jelas dan telah disepakati bersama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, yang menjadi bagian penting sistem pendidikan nasional perlu memiliki standar mutu yang jelas. Maka standar mutu pendidikan pesantren yang bermutu adalah lembaga pendidikan pesantren yang dapat memenuhi standar pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005,

²⁰Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Widiasaranan Indoensia, 2003), 68.

sebagaimana yang mencakup delapan standar. Dengan demikian, pendidikan pesantren dikatakan bermutu apabila orientasi mutu pendidikan yang terdiri dari *input*, proses dan *output* dapat terpenuhi dengan baik.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

- 
- (a) Standar Kompetensi Lulusan
 - (b) Standar Isi
 - (c) Standar Proses
 - (d) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - (e) Standar Sarana dan Prasarana
 - (f) Standar Pengelolaan
 - (g) Standar Pembiayaan Pendidikan
 - (h) Standar Penilaian Pendidikan

Adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan:

- (a) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- (b) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

- (c) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari upaya-upaya semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu pesantren-pesantren harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (*center for excellence*) dan ini mendorong masing-masing pesantren agar dapat menentukan visi dan misinya untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan santrinya.

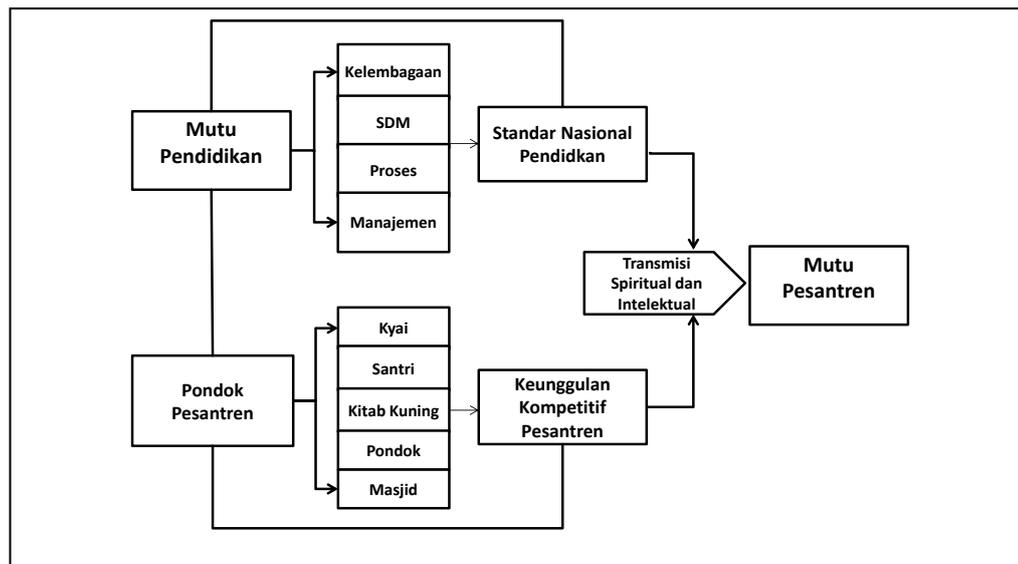
Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan santri untuk belajar. Kondisi ini mendorong pesantren untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan preralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen tersebut pesantren harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi santri. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu.

Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus penjaminan mutu adalah mutu lulusan, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar santri. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program pesantren dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Pondok pesantren dengan predikat pengusung pendidikan agama ternyata mampu memberikan peran lebih riil terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial pondok pesantren dapat dimaknai tidak hanya terbatas pada penyajian ilmu-ilmu agama yang terkait erat dengan kebutuhan spiritual atau rohani, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Pesantren, dengan demikian akan mendapat tempat dan berhasil memenuhi kebutuhan (*need*) masyarakat.²¹

²¹Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 22.

Secara sederhana, kerangka pemikiran di atas bisa digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya kajian tentang pendidikan pondok pesantren telah banyak dibahas oleh beberapa sarjana dan pemerhati pendidikan, baik dengan cara kolektif maupun individual dengan sudut pandang yang berbeda. Kajian-kajian tersebut, yang kebanyakan merupakan hasil penelitian untuk mengakhiri studi pada program doktor tersebut, tentu saja banyak memberikan kontribusi bagi kajian ini, khususnya dalam hal kepeloporan mengeksplorasi sumber-sumber sekunder. Meskipun demikian, kajian ini jelas berbeda dari berbagai penelitian

tersebut. Sebab, tulisan ini mempunyai fokus tersendiri yang menjadikannya berbeda dari studi tentang pesantren yang dilakukan oleh para sarjana tersebut.

1. Penelitian dengan judul: Pengaruh Sumberdaya Manusia, Budaya Organisasi, dan Penggunaan Teknologi terhadap Aplikasi Manajemen Pengetahuan dalam Rangka Optimalisasi Mutu Pendidikan Formal Lingkungan Pesantren (Penelitian pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pesantren Al-Musaddadiyah Garut). Ditulis oleh Hilda Ainis Syifa, diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2013. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis varian menunjukkan bahwa masing-masing kondisi variabel penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk setiap satuan kerja (sekolah/madrasah) yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian berbasis analisis jalur menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel sumberdaya manusia, budaya organisasi, dan penggunaan teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aplikasi manajemen pengetahuan dalam rangka optimalisasi mutu pendidikan formal di lingkungan pesantren.
2. Penelitian dengan judul: Karakteristik Kepemimpinan Kyai dalam memelihara Budaya organisasi dan kontribusinya terhadap mutu pendidikan pondok pesantren. (Studi di Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman: *Islamic Boarding Schools* Bogor dan Pesantren Amanah

Muhammadiyah Tasikmalaya) di tulis Oleh Pepen Supendi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kedua pondok pesantren tersebut, masih tetap *survive* dan menjadi alternatif utama bagi para orang tua untuk memasukkan putra-puterinya. Hal tersebut disebabkan oleh berhasilnya kiai sebagai pemimpin pesantren dalam menciptakan karakter para santri yang telah berhasil membuktikan kualitas pendidikan, pengabdianya pada umat, bangsa, dan negara.

3. Penelitian dengan judul: *Pembaruan Pondok Pesantren Masa Orde Baru: Studi Komparatif Mengenai Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon*, ditulis oleh Khoirul Wahidin, diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kyai di kedua pesantren yang diteliti mengadakan berbagai perubahan agar kedua pesantren itu tetap eksis.²² Penelitian ini tidak memberikan penjelasan tentang bertahannya lembaga pendidikan pondok pesantren salafiyah di tengah modernisasi yang dilakukan lembaga tersebut.

²²Khirul Wahidin, *Pembaruan Pendidikan Masa Orde Baru: Studi Komparatif mengenai Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon*, Disertasi (Jakarta: Program Pps IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).

4. Penelitian dengan judul: Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Pesantren, ditulis oleh Edeng ZA, diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati tahun 2011.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian di Pondok Pesantren Sukahideung Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pondok Pesantren Sukahideung dengan sistem *boarding school* telah mengembangkan manajemen mutu pendidikannya dalam bentuk perencanaan mutu (*quality planning*), pengendalian mutu (*quality control*) dan perbaikan mutu (*quality improvement*). Namun, penelitian ini tidak menjelaskan optimalisasi mutu pendidikan pondok pesantren di bawah organisasi masyarakat Islam yang jelas akan berbeda satu sama lain.
5. Penelitian dengan judul: Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Pesantren: Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga, Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan Pesantren Al-Furqon Prababumilah Sumatera Selatan oleh Husnul Amin²⁴ diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2011, menunjukkan bahwa bertahannya Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga karena pembaharuan sistem pendidikan yang dilakukannya di antaranya: menyelenggarakan

²³Edeng ZA. *Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Pesantren* (Bandung: Disertasi UIN Sunan Gunung Djati, 2011).

²⁴H Amin, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Pesantren: Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga, Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan Pesantren Al-Furqon Prababumilah Sumatera Selatan* (Bandung: Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2011).

pendidikan formal madrasah dan sekolah umum dengan menutup madrasah diniyah dengan tujuan terbukanya peluang yang lebih besar bagi alumninya untuk dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi, dan fungsi utama pendidikan tradisional Islam tetap terjaga melalui jalur pendidikan formal. Sementara, bertahannya Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan Pesantren Al-Furqon, di samping menyelenggarakan pendidikan formal bentuk madrasah, juga tetap mempertahankan institusi pendidikan tradisionalnya dengan menjamin alumninya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan memasuki lapangan kerja sektor formal.

6. Penelitian Husnul Amin menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang sebagian sudah menggratiskan sekolah diduga akan mengusir keberadaan pesantren (yang masih memberlakukan biaya bulanan yang relatif besar), tapi pada kenyataannya tidak semua demikian apabila dilaksanakan proses pembaharuan sistem pendidikan Islam di pesantren, seperti yang penelitian yang dilaksanakan oleh Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan Pesantren Al-Furqon Prabumulih Sumatra Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertahannya pesantren Raudhatul Ulum Salatiga, karena berbagai pembaruan sistem pendidikan yang dilakukannya di antaranya: menyelenggarakan pendidikan formal madrasah dan sekolah umum, dengan menutup madrasah diniyahnya dengan tujuan, terbukanya peluang

yang lebih besar bagi alumni-alumninya untuk dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi, dan fungsi utama pendidikan tradisional Islam tetap terjaga melalui jalur pendidikan formal. Sementara bertahannya pesantren Al-Ittifaqiah dan Al-Furqon, disamping menyelenggarakan pendidikan formal bentuk madrasah, juga tetap mempertahankan institusi pendidikan tradisionalnya, dengan menjamin alumninya bisa lanjut studi ke perguruan tinggi dan memasuki lapangan kerja di sektor formal. Pembaharuan juga berpengaruh kepada terjaganya fungsi utama pendidikan tradisional dan kelembagaannya sekaligus. Kenyataan tersebut bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) proses terjadinya pembaharuan sistem pendidikannya yang menggunakan konsep *kasb* dan paradigma progresif, 2) faktor yang mempengaruhinya, yaitu: visi kyai, sistem nilai yang dianut, literatur yang dipelihara dan diwariskan, politik pendidikan, dan tuntutan dunia kerja, 3) dampak pembaharuan secara internal yang meliputi: kelembagaan, Kyai, pendidik, dan peserta didik, dan dampak eksternal yang meliputi: perguruan tinggi, dan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pengelola pesantren lain yang ingin mengadakan pembaharuan sistem pendidikannya, paling tidak dapat menjadikan ketiga pesantren objek penelitian tersebut sebagai model atau perbandingan.

7. Penelitian dengan judul: Perubahan Orientasi Pesantren yang mengambil fokus dua pesantren, yaitu Maskumambang Gresik dan Al-Fatah Magetan

oleh M Suparta²⁵ diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Disertasi ini memperlihatkan bahwa perubahan orientasi keilmuan kyai mempunyai pengaruh besar untuk mengubah wajah pondok pesantren yang pada gilirannya mempengaruhi wajah keagamaan masyarakat. Dua pesantren yang diteliti dalam disertasi ini termasuk pesantren tua. Pesantren Maskumambang berdiri tahun 1859 oleh Kyai Abdul Jabbar (w. 1907), dan pesantren Al-Fatah didirikan pada 1912 oleh Kyai Siddiq (w. 1950). Pada awalnya dua pesantren ini dapat dikatakan sebagai tipikal pesantren NU yang mengembangkan paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja). Namun dalam perjalanannya, kedua pesantren tersebut berganti wajah. Pesantren Maskumambang berganti wajah dari pesantren salafiyah-aswaja menjadi *modern-wahabi*. Sedang Al-Fatah Magetan berubah dari *salafiyah-tarekat-aswaja* menjadi pesantren berwajah *majlis tabligh*.

Keseluruhan penelitian di atas jelas tidak mengkonsentrasikan pada bagaimana pondok pesantren melakukan upaya optimalisasi mutu dan akhirnya menjadi berkembang, bahkan sangat berkembang dan mempertahankan lembaga pendidikan pesantren di tengah modernisasi yang dilakukan. Dengan demikian, posisi kajian ini di antara karya-karya yang telah mengkaji pesantren tersebut jelas berbeda. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui tentang upaya optimalisasi

²⁵Suparta M, *Metamorfosis Pesantren: Studi tentang Perubahan Orientasi Pesantren Maskumambang Gresik dan Al-Fatah Magetan* (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

mutu pendidikan Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Garut, bagaimana upaya optimalisasi, kendala yang dihadapi, serta dampak dan prospek dari optimalisasi mutu yang dilakukannya.

